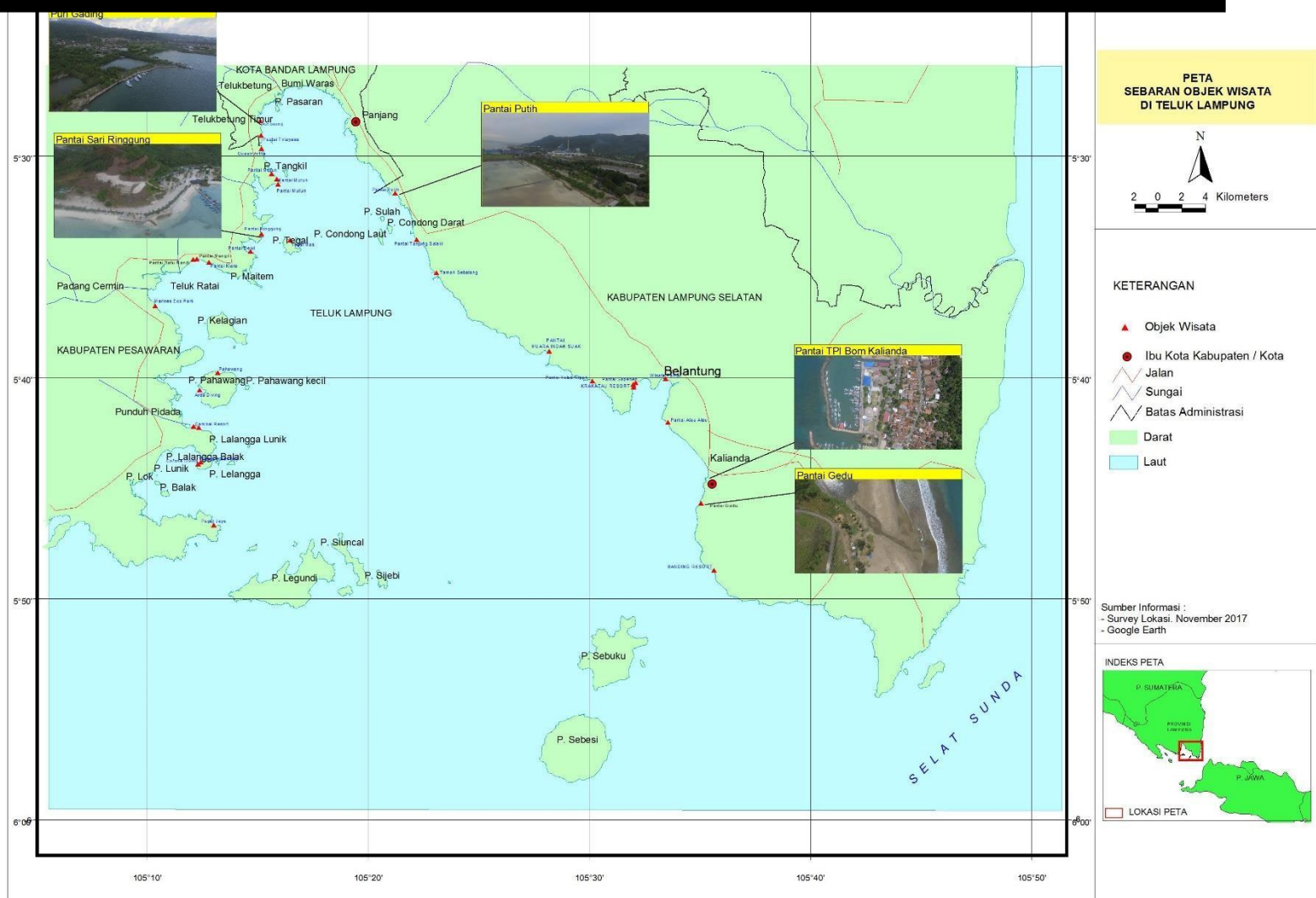


POLICY PAPER

KAJIAN GERAKAN MEMBANGUN PESISIR LAMPUNG BERDAYA GUNA “GERBANG PELANA”



Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat - Institut
Pertanian Bogor
2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
II ISU DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	6
2.1 Isu Strategis Sosial-Ekologi Wilayah Pesisir Lampung.....	6
2.2 Pemetaan Isu Strategis Sosial-Ekologi Wilayah Teluk Lampung	11
III PETA JALAN PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN PESISIR LAMPUNG BERDAYA GUNA.....	13
3.1 <i>Multi Objective</i> Gerbang Pelana	13
3.1.1 Visi dan Misi	13
3.1.2 Tujuan dan Sasaran	16
3.2 Peta Jalan Strategi Pencapaian Tujuan.....	18
IV INOVASI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM GERBANG PELANA.....	32
4.1 Inovasi Program Gerbang Pelana.....	32
4.2 Indikator Keberhasilan Gerbang Pelana	33
V PENUTUP.....	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Rekomendasi Tindak Lanjut	36

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegagalan pembangunan di suatu negara umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu (i) pilihan konsep dan strategi pembangunan (ideologi) itu sendiri, termasuk keberpihakan kepada wilayah atau kelompok masyarakat tertentu, dan (ii) karena perencanaan yang kurang baik. Di Indonesia, pada umumnya ketertinggalan pembangunan di wilayah pesisir dan laut lebih banyak disebabkan dua hal di atas sekaligus. Pilihan strategi pembangunan Indonesia yang tidak berpihak dan atau berbasis pada kelautan sebagai penggerak utama pembangunan serta ketidakjelasan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir telah mulai dirasakan dampaknya, seperti (i) penurunan kualitas sumberdaya pesisir dan laut, (ii) kurang berkembangnya kegiatan ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, serta (iii) terjadinya ketergantungan yang semakin besar pada impor bahan pangan pokok, dimana upaya swasembada pangan terganjal oleh terjadinya konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman.

Indikator ketidak-berpihakan pilihan strategi pembangunan terhadap wilayah pesisir Lampung dapat dilihat dari rendahnya sumbangan sektor kelautan terhadap PDB/PDRB, yaitu hanya sebesar 6,96 persen yang hanya disumbangkan oleh subsektor perikanan (6,46 persen) dan transportasi laut (0,50 persen) (BPS RI, 2015). Indikator lainnya adalah kerusakan ekosistem pesisir dan laut yang sudah sangat marak terjadi, seperti abrasi, pencemaran, kekumuhan, dan minimnya infrastruktur kecamatan. Ini semua salah satunya disebabkan oleh tidak adanya cetak biru (*blue print*) perencanaan pembangunan khusus wilayah pesisir dan laut yang berupa peta jalan pengembangan wilayah pesisir sehingga lokus dan fokus pembangunan menjadi tidak jelas dan tidak tepat sasaran.

Pembangunan yang tidak terencana, di sisi lain mengakibatkan kondisi wilayah pesisir dan laut Indonesia umumnya saat ini mengalami gejala penurunan kualitas yang signifikan, sebagaimana juga dialami oleh Provinsi Lampung. Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi kelautan, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tinggi dan diperkaya dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar, namun tingkat pemanfaatan pada umumnya masih belum dilakukan secara

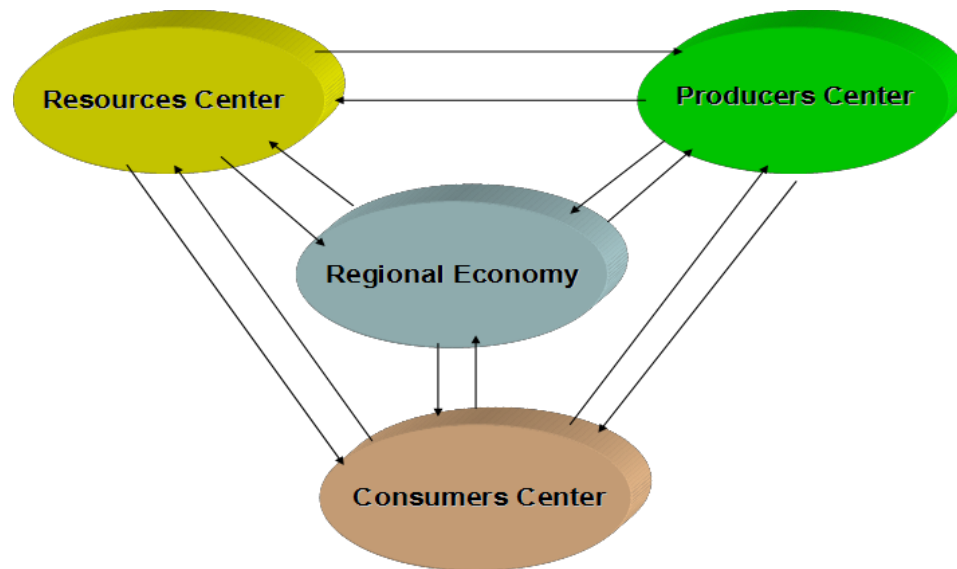
optimal, padahal wilayah pesisir Provinsi Lampung mencakup 7 (tujuh) kabupaten/kota yang juga memiliki potensi besar untuk berkembang dalam kerangka pembangunan pesisir dan laut terpadu dan berkelanjutan.

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ke-2 di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data BPS tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Lampung tercatat lebih dari 8,2 juta jiwa, bahkan jika berdasarkan data registrasi penduduk, jumlahnya telah mencapai 9,5 juta jiwa. Provinsi Lampung yang memiliki garis pantai sepanjang 1105 kilometer yang merupakan terpanjang kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga mempunyai potensi sumberdaya alam yang luar biasa, antara lain: perikanan, ekosistem pesisir dan laut (mangrove, lamun, terumbu karang dan pulau-pulau kecil), rumput laut dan pariwisata, serta potensi kelautan lainnya.

Namun demikian, kondisi wilayah pesisir Provinsi Lampung masih cukup memprihatinkan diantaranya pemenuhan infrastruktur dasar yang masih minim, kegiatan perekonomian masyarakat yang belum berkembang serta kehidupan masyarakat yang belum berdaya. Dari kondisi tersebut, sebagai salah satu lokomotif pembangunan ekonomi, pembangunan wilayah pesisir Lampung tentunya harus diarahkan lebih jelas agar kabupaten/kota, kecamatan dan desa-desa beserta penduduk di wilayah pesisir dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain dari sisi infrastruktur dan berkembangnya perekonomian masyarakatnya.

Sebagai sumberdaya yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi, baik nasional maupun daerah, proses pembangunan kelautan dan perikanan harus lebih mampu berperan dan berdaya guna untuk kemajuan daerah pada umumnya dan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup tinggi dimiliki Provinsi Lampung, seharusnya dapat menjadi keunggulan komparatif yang tinggi pula. Potensi keunggulan komparatif yang tinggi ini dapat dikembangkan sebagai keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan oleh kecamatan dan desa di wilayah pesisir, sehingga mampu meningkatkan kemajuan wilayah, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, strategi dalam mendorong pembangunan di wilayah pesisir haruslah tetap didesain dan berpegang teguh pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), agar pembangunan yang dilakukan dapat dilakukan secara optimal, adil dan berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi wilayah berbasis sumberdaya dapat bertumpu pada tiga pilar yaitu sebagai sentral produsen, sentral konsumen, dan sentral sumberdaya itu sendiri. Ketiga pilar ini dapat dioptimalisasi secara bersamaan maupun parsial tergantung pada kondisi dan situasi wilayah serta kemampuan wilayah tersebut untuk mengembangkan potensinya, sebagaimana dicantumkan dalam **Gambar 1**.



Gambar 1. Tiga pilar pembangunan ekonomi wilayah berbasis sumberdaya (Adrianto, 2007)

Provinsi Lampung seharusnya mampu menjalankan pembangunan khususnya di wilayah pesisir dalam kerangka tiga pilar ini. Dalam konteks tersebut, kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung dapat dikatakan memiliki pilar pertama yaitu *resources center*. Sementara itu, peran provinsi sebagai pusat produsen (*producers center*) bagi produk dan jasa kelautan dan perikanan juga memiliki arti penting dan cukup potensial. Sebagai pusat konsumen (*consumers center*), Provinsi Lampung berpotensi menjadi salah satu pintu keluar bagi ekspor hasil kelautan dan perikanan (pasar ekspor) maupun menjadi salah satu pusat pertumbuhan pasar daerah (pasar domestik).

Dalam tataran pembangunan tentunya diperlukan sinergisitas dan keterpaduan, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, keterpaduan ini mutlak harus dilakukan. Keterpaduan dalam hal ini, bukan hanya keterpaduan sektor terkait, juga termasuk didalamnya adalah keterpaduan konsep “mind set” dan keterpaduan program kegiatan. Pelaksanaan suatu program, didukung oleh program-program lainnya,

sehingga proses pelaksanaannya dapat fokus kepada sasaran serta hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan (tepat guna/tepat sasaran).

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung sudah semestinya memiliki suatu dokumen peta jalan perencanaan dan pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di wilayahnya, guna memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai perencanaan dan pengembangan yang akan dilaksanakan, komoditi potensial yang akan dikembangkan, daya dukung lingkungan, sarana dan prasarana pendukung, serta hal-hal lain yang terkait. Provinsi Lampung menginisiasi salah satu program pembangunan yang dapat menjadi program unggulan terpadu, yang kemudian disebut dengan jargon GERBANG PELANA (Gerakan Membangun Masyarakat Pesisir Lampung yang Berdaya Guna). Program ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan perekonomian masyarakat, dan memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir, yang mencakup 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir. Program GERBANG PELANA harus dirancang, direncanakan, dan dilaksanakan secara matang dengan tahapan dan indikator yang jelas dan terukur, sehingga program tersebut dipahami dan mudah dilaksanakan oleh pelaksana dan penerima manfaat yaitu aparat pemerintah dan masyarakat.

GERBANG PELANA adalah suatu program percepatan sinergitas pembangunan wilayah pesisir Lampung dan sekitarnya dengan mengoptimalkan segenap potensi SDM, SDA, infrastruktur, kebijakan-kebijakan pusat dan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah pesisir untuk mewujudkan masyarakat pesisir Lampung yang maju dan sejahtera. Strategi GERBANG PELANA antara lain:

- (i) Optimalisasi potensi kewilayahan pesisir: pengembangan potensi sesuai dengan tematik SDA pesisir,
- (ii) Keterpaduan, sinergi, harmonisasi antar sektor, stakeholder, ekosistem darat dan laut, wilayah, sains dan manajemen,
- (iii) Inovasi dan hilirisasi SDA dan pengembangan pesisir: mewujudkan adanya daya tambah terhadap SDA, pembangunan kawasan industri dan pariwisata,
- (iv) Konservasi SDA untuk keberlanjutan: pemanfaatan SDA harus mempertimbangkan kesinambungan lingkungan dan masa depan, dan

- (v) Evaluasi dan penetapan indikator capaian: penguatan potensi pesisir dan wilayah sekitarnya.

Penyusunan peta jalan GERBANG PELANA ini merupakan salah satu unsur penting dari pembangunan suatu daerah, guna menentukan fokus dan lokus pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir Provinsi Lampung yang lebih fokus, terukur, dan terpadu serta berkelanjutan, maka diperlukan suatu kajian ini. Dokumen ini adalah bentuk nyata sebuah desain dan rencana program pembangunan di wilayah pesisir dan laut Provinsi Lampung yang komprehensif, yang secara khusus disebut Peta Jalan GERBANG PELANA.

Secara konseptual, pembangunan di Provinsi Lampung dibagi menjadi 3 (tiga) klaster, yaitu: kawasan pariwisata di bagian barat, kawasan penyangga ketahanan pangan di bagian tengah dan kawasan industri di bagian timur. Luasnya wilayah kajian menyebabkan kedalaman kajian memerlukan pemokusian yang lebih proporsional yang didukung oleh fakta dan analisis yang menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemusatan kajian dan lokasi implementasi, sehingga perlu dipilih prioritas daerah yang harus dikaji terlebih dahulu. Pada kajian pertama ini, wilayah kajian difokuskan pada Teluk Lampung yang meliputi 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan. Ketiga daerah tersebut perlu diprioritaskan agar kompleksitas pembangunan wilayah pesisir yang saat ini ada dapat diurai dan lebih difokuskan sesuai dengan tujuan besar dari Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan kajian ini adalah memberdayakan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumberdaya alam dengan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di wilayah pesisir Lampung.

Tujuan kegiatan kajian ini adalah menyediakan desain pengembangan kawasan serta rancangan program kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir Lampung, khususnya di wilayah pesisir Lampung.

II ISU DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

2.1 Isu Strategis Sosial-Ekologi Wilayah Pesisir Lampung

Pada kajian Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdayaguna (GERBANG PELANA) ini terdapat 5 (lima) kelompok permasalahan pokok dalam sistem sosial-ekologi (SSE) di Teluk Lampung, yaitu: (1) isu lingkungan dan sumberdaya alam; (2) isu sosial dan kelembagaan; (3) isu strategis ekonomi; (4) isu infrastruktur; dan (5) isu pendidikan. Ada keterkaitan erat antara karakteristik sumberdaya alamnya/kondisi wilayah, karakteristik sosial budaya, dan sumberdaya manusianya (pendidikan) dengan peluang pengembangan ekonominya. Selain itu karakteristik masyarakat dan stratifikasi sosial yang terbentuk juga mempengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh wilayah setempat. Isu pengelolaan dan kepemilikan perorangan terhadap pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Teluk Lampung berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada pendapatan masyarakat, seperti terjadi pengurangan daerah tangkapan ikan dan kurangnya lokasi-lokasi strategis dalam pengembangan wisata berbasis pulau-pulau kecil. Secara garis besar isu dan permasalahan di bawah ini dapat dikelompokkan menjadi wilayah pesisir Teluk Lampung.

A. Isu Strategis Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Isu lingkungan dan sumberdaya alam yang dijumpai di wilayah studi mencakup perubahan kondisi fisik wilayah seperti hilangnya kemunculan lumba-lumba di perairan Teluk Lampung, reklamasi, dan abrasi pantai. Isu lain terkait kualitas lingkungan seperti pencemaran perairan baik oleh limbah industri (skala besar maupun skala rumah tangga) dan limbah rumah tangga. Isu terakhir adalah pola pemanfaatan sumberdaya pesisir, khususnya penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti mini trawl dan masih adanya isu penggunaan bahan potasium dalam penangkapan ikan. Akibatnya adalah semua jenis dan ukuran ikan akan tertangkap, termasuk anak ikan (*juvenile*), sehingga produktivitasnya cukup tinggi. Secara rinci beberapa isu strategis lingkungan dan sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir Teluk Lampung dapat dipetakan dengan nilai skoring yang terdapat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Nilai skor isu permasalahan di bidang lingkungan dan sumberdaya alam

No	Isu dan Permasalahan	Nilai Penting
1	Sumberdaya ikan yang masih terbatas dengan adanya musim	2
2	Adanya reklamasi pantai	3
3	Abrasi pantai	3
4	Masih adanya penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (penggunaan trawl, penggunaan bahan peledak dan bahan kimia)	3
5	Pencemaran perairan di Teluk Lampung, seperti bahan plastik dan bahan organik lainnya	3
6	Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah terkait pelestarian sumberdaya pesisir dan laut	2
7	Hilangnya informasi terkait kemunculan lumba-lumba di perairan Teluk Lampung	1
8	Adanya indikasi kerusakan pada ekosistem terumbu karang akibat bahan peledak dan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan	3
9	Belum adanya kajian terkait daya dukung dan daya tampung untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut di Teluk Lampung khususnya untuk kegiatan wisata	2
Total		21

Keterangan: 1 = cukup penting; 2 = penting, 3 = sangat penting

B. Isu Strategis Sosial dan Kelembagaan

Isu sosial dan kelembagaan secara umum terlihat adanya konflik atau potensi konflik dalam kepemilikan pulau-pulau kecil yang dikuasai oleh perorangan, kualitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki masih kurang, serta ketidakhadiran peran lembaga ekonomi seperti koperasi.

Selain itu adanya kepentingan terutama pada akses sumberdaya dan transaksi ekonomis, maka terjadi perebutan pengaruh antar kelompok nelayan maupun adanya

dominasi juragan/bakul/pengepul terhadap nelayan di lokasi studi. Kondisi menyebabkan terjadinya posisi tawar nelayan yang lebih rendah, karena penjualan hasil perikanan tidak bisa dilakukan secara lelang (bersaing). Hal ini dikarenakan tidak berfungsinya kelembagaan koperasi, baik karena permasalahan kualitas manajerial, pengelolaan usaha maupun kapital. Sehingga banyak nelayan berhutang ketika terjadi musim penangkapan ikan yang susah dan sifat dari nelayan yang konsumtif.

Secara kelembagaan sektoral masih belum adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengembangan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan laut. Selain itu juga kurangnya pengawasan dari penegak hukum terkait aktivitas yang ada di wilayah perairan Teluk Lampung. Penilaian isu strategis sosial dan kelembagaan secara lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Nilai skor isu permasalahan di bidang sosial dan kelembagaan

No	Isu dan Permasalahan	Nilai Penting
1	Dominasi dan kuatnya pengaruh juragan/bakul/pengepul	3
2	Konflik kepemilikan pulau-pulau kecil oleh perorangan	3
3	Manajemen pemberdayaan ekonomi pemerintah yang belum fokus dan terpadu;	2
4	Lemahnya lembaga ekonomi dan pasar untuk mendukung perekonomian masyarakat.	2
5	Ketaatan dan penegakan hukum yang masih lemah	3
6	Kurangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu	2
7	Kualitas dari sumberdaya manusia yang masih kurang	3
Total		18

Keterangan: 1 = cukup penting; 2 = penting, 3 = sangat penting

C. Isu Strategis Ekonomi

Secara umum isu perekonomian mencakup isu input, output, pasar dan alternatif perekonomian. Pada sisi input, isu perekonomian wilayah pesisir yang sekarang masih menjadi isu bersama adalah modal yang terbatas dalam usaha melakukan penangkapan dan minimnya sarana dan prasarana seperti akses jalan dan infrastruktur dalam menunjang aktivitas perekonomian. Hal ini dirasakan cukup signifikan. Pada sisi

output, penurunan produksi baik tambak maupun budidaya juga menjadi isu yang secara umum dijumpai di wilayah studi. Persoalan pasar menyangkut proses penjualan produksi yang dirasakan tidak adil bagi nelayan sebagai produsen, seperti karena dominasi pembeli/tengkulak yang cukup besar. Hal ini terjadi karena alternatif lembaga ekonomi lain seperti koperasi nelayan tidak berfungsi dengan baik. Persoalan pasar lainnya adalah minimnya inovasi produk olahan hasil perikanan dan perairan yang mempunyai nilai tambah (*added value*), seperti inovasi pengemasan masih kurang bagus dan inovasi produk semi karagenan untuk peningkatan nilai jual rumput laut E.cottoni di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan masih belum ada. Nilai penting dari aspek perekonomian beberapa isu dan permasalahan strategis dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Nilai penting isu dan permasalahan pada aspek ekonomi

No	Isu dan Permasalahan	Nilai Penting
1	Akses modal terbatas	2
2	Aktivitas ekonomi yang bersifat musiman	3
3	Sarana prasarana perikanan yang minim dan tidak optimal	3
4	Masih belum optimalnya pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dalam pengembangan perekonomian desa	2
5	Kurangnya pengembangan nilai tambah produk	3
Total		13

Keterangan: 1 = cukup penting; 2 = penting, 3 = sangat penting

D. Isu Strategis Infrastruktur

Persoalan utama pada infrastruktur di lokasi studi secara spesifik melihat bagaimana kondisi infrastruktur yang membuka aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Infrastruktur ekonomi berupa pasar desa atau pasar terdekat pada umumnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan kapasitas ekonominya. Isu infrastruktur aksesibilitas menjadi problematika dalam pengembangan perekonomian di wilayah Teluk Lampung, hal ini dikarenakan daya tampung dan kepadatan akses melalui jalan darat sudah melampaui batasannya (*overlud*), sehingga

banyak jalan yang rusak. Pada beberapa wilayah, terbatasnya moda transportasi umum yang melayani rute di wilayah pesisir dirasakan menjadi permasalahan baik untuk pengangkutan orang atau barang. Kondisi ini berimplikasi pada aktivitas ekonomis maupun kegiatan sosial masyarakat lainnya. Nilai penting dari aspek infrastruktur beberapa isu dan permasalahan strategis dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Nilai penting isu dan permasalahan pada aspek infrastruktur

No	Isu dan Permasalahan	Nilai Penting
1	Kurangnya pengembangan konektivitas transportasi	2
2	Padatnya lalulintas arus barang dan jasa melalui jalan darat (jalan utama)	3
3	Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur untuk wilayah pulau-pulau kecil terluar	3
4	Pemerataan pembangunan yang masih belum seimbang	1
Total		9

Keterangan: 1 = cukup penting; 2 = penting, 3 = sangat penting

E. Isu Strategis Pendidikan

Secara umum isu jumlah fasilitas pendidikan sudah menjadi isu penting, demikian pula dengan tenaga pendidik untuk di wilayah pesisir Teluk Lampung. Isu pendidikan di lokasi studi lebih pada sumberdaya manusia terkait dengan kesadaran tentang pendidikan formal. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan (formal) juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan biaya terutama biaya transportasi. Hal ini dikarenakan lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman penduduk di wilayah pesisir.

Selain itu kesadaran yang rendah akan pentingnya pendidikan formal juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tuanya, yang melihat bahwa alternatif mata pencaharian bagi anaknya hanya untuk kegiatan melakukan penangkapan ikan yang tidak memerlukan persyaratan pendidikan formal yang tinggi. Sehingga nantinya dapat merubah pola berfikir dari anak akan kurangnya kesadaran dalam dunia pendidikan. Hal tersebut nantinya akan mempengaruhi masa depan dan perekonomian dimasa mendatang. Nilai penting dari aspek pendidikan terkait beberapa isu dan permasalahan strategis dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Nilai penting isu dan permasalahan pada aspek pendidikan

No	Isu dan Permasalahan	Nilai Penting
1	Kesadaran pendidikan rendah	2
2	Keberadaan sekolah yang masih jauh dari pemukiman nelayan	2
3	Pengaruh orang tua akan keperluan pendidikan formal (masih rendah)	3
Total		7

Keterangan: 1 = cukup penting; 2 = penting, 3 = sangat penting

2.2 Pemetaan Isu Strategis Sosial-Ekologi Wilayah Teluk Lampung

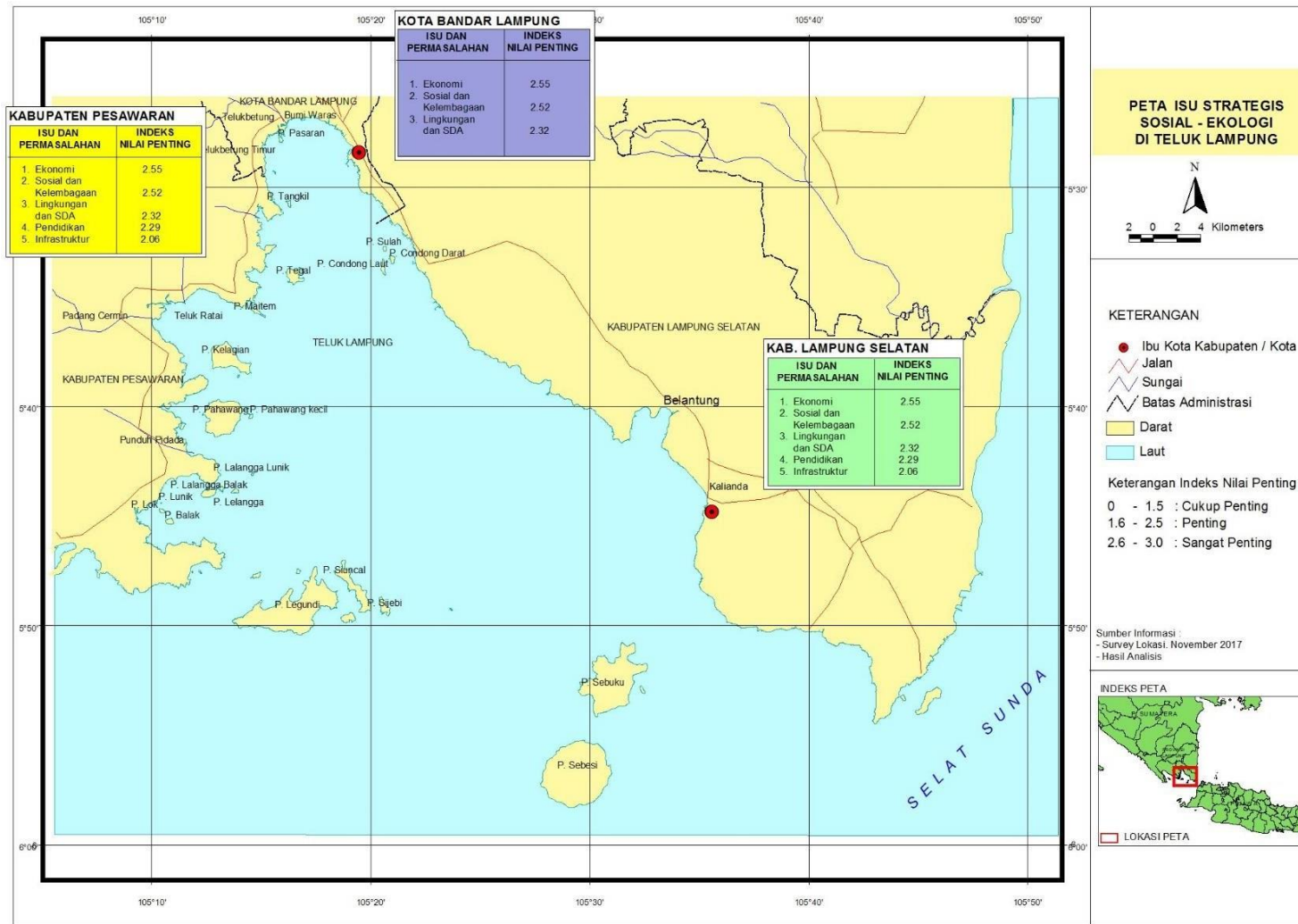
Berdasarkan analisis geometri dari nilai penting dari isu dan permasalahan yang ada di Teluk Lampung dengan melihat 5 kelompok isu dan permasalahan yang dimiliki oleh wilayah studi, maka pemetaan isu dan permasalahan yang ada di lokasi studi tersaji pada **Tabel 6** dan **Gambar 2**.

Tabel 6. Matriks isu dan permasalahan di lokasi studi

Rangking	Isu dan Permasalahan	Indeks Nilai Penting	Kategori	Sebaran di Lokasi Studi		
				Kabupaten Pesawaran	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Lampung Selatan
1	Ekonomi	2,55	Sangat Penting	√	√	√
2	Sosial dan Kelembagaan	2,52	Sangat Penting	√	√	√
3	Lingkungan dan SDA	2,32	Penting	√	√	√
4	Pendidikan	2,29	Penting	√	-	√
5	Infrastruktur	2,06	Penting	√	-	√

Keterangan: 0 – 1,5 : cukup penting
 1,6 – 2,5 : penting
 2,6 – 3,0 : sangat penting

Berdasarkan hasil analisis diatas menyebutkan bahwa isu dan permasalahan utama dalam kajian GERBANG PELANA di lokasi Teluk Lampung ini adalah kelompok isu ekonomi dan sosial kelembagaan menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan konflik dalam kepemilikan pulau-pulau kecil yang dikuasai oleh perorangan, kualitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki masih kurang, serta ketidakhadiran peran lembaga ekonomi seperti koperasi. Sehingga banyak nelayan yang berhutang kepada para juragan/pengepul pada saat musim susah ikan dan ketika mereka memiliki banyak uang membelanjakan semua uang hasil tangkapannya.



Gambar 2. Peta isu dan permasalahan di lokasi studi

III PETA JALAN PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN PESISIR LAMPUNG BERDAYA GUNA

3.1 *Multi Objective* Gerbang Pelana

3.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan ungkapan keinginan atau harapan atau pandangan masa depan yang ingin dicapai semua pihak yang terkait (stakeholders) dari pengelolaan pesisir Lampung. Dengan visi ini diharapkan sumberdaya pesisir Lampung dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Gerbang Pelana merupakan program unggulan daerah Provinsi Lampung yang didesain agar dapat memberikan percepatan bagi pembangunan wilayah pesisir yang berdaya guna dan berbasis pada 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu (i) percepatan pembangunan infrastruktur, (ii) percepatan pembangunan ekonomi, dan (iii) perkuatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penggalian aspirasi masyarakat dan hasil agregasi potensi, isu dan permasalahan dari data sekunder dan penelitian lapang, maka terungkap beberapa kata kunci yang menjadi dasar pembangunan visi pengelolaan pesisir Lampung. Kata-kata kunci tersebut diantaranya adalah:

- (i) sumberdaya alam dan lingkungan,
- (ii) pesisir Lampung,
- (iii) sumber penghidupan,
- (iv) optimal,
- (v) terpadu,
- (vi) berkelanjutan, dan
- (vii) kesejahteraan masyarakat.

Sumberdaya alam dan lingkungan pesisir merupakan fokus sumberdaya yang harus dikelola sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Sumberdaya pesisir Lampung terdiri dari sumberdaya terbarukan (*renewable resources*), sumberdaya tidak terbarukan (*non renewable resources*) dan jasa lingkungan (*environmental services*). Sumberdaya terbarukan diantaranya seperti sumberdaya perikanan (ikan, moluska, kerang, dll), vegetasi pantai (pandan, waru,

ketapang), terumbu karang, rumput laut, pertanian pesisir dan sebagainya. Sumberdaya tidak terbarukan misalnya seperti pasir, batuan, dan sebagainya, sedangkan jasa lingkungan diantaranya seperti pariwisata, perhubungan, sumberdaya buatan lainnya, dan sebagainya. Segenap sumberdaya pesisir ini secara sinergi memberikan manfaat yang sekarang ini dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sumberdaya pesisir dalam hal ini dijadikan sebagai salah satu kata kunci dalam membangun visi Gerbang Pelana.

Wilayah pesisir Lampung merupakan batasan wilayah pengelolaan pesisir terpadu (*integrated coastal management*) pada implementasi Gerbang Pelana. Wilayah pesisir Lampung prioritas meliputi tujuh daerah pesisir, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Timur, dan Tulang Bawang.

Sumber penghidupan adalah suatu sumber yang memberikan manfaat secara materi yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup. Dalam hal ini, masyarakat menyatakan bahwa pesisir Lampung merupakan daerah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sumber penghidupan mereka, seperti hasil perikanan, hasil pertanian, hasil pertambangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sumber penghidupan dalam hal ini dijadikan sebagai salah satu kata kunci dalam membangun visi pengelolaan pesisir Lampung.

Optimal adalah suatu posisi dimana pengelolaan menghasilkan kondisi yang stabil secara ekonomi dan ekologi. Dalam hal ini, sumberdaya perikanan misalnya ketika akan dikelola secara optimal, maka yang harus dilakukan adalah menentukan potensi maksimum yang lestari (*maximum sustainable yield, MSY*), dimana dalam kondisi ini tingkat pemanfaatan sumberdaya berada pada posisi optimal (E^*) secara ekologi. Oleh karena itu, untuk menghasilkan tingkat optimal secara ekonomi dan ekologi, maka perlu ditentukan potensi maksimum lestari secara ekonomi (*maximum economic yield, MEY*) yang juga menghasilkan tingkat upaya optimal secara ekonomi. Tingkat upaya inilah yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk menentukan jumlah alat tangkap dan nelayan optimal agar sumberdaya perikanan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, optimal dalam hal ini dijadikan sebagai salah satu kata kunci penting dalam membangun visi pengelolaan pesisir Lampung.

Terpadu adalah sebuah sifat yang menandakan keseluruhan yang bersinergi dan terkoordinasi. Wilayah pesisir Lampung merupakan wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi dan ekologi yang cukup beragam, sehingga sangat diperlukan keterpaduan pengelolaan, sehingga tumpang tindih kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, terpadu dalam hal ini dijadikan sebagai salah satu kata kunci penting dalam membangun visi Gerbang Pelana.

Berkelanjutan adalah sebuah sifat yang menandakan bahwa sesuatu itu dapat dimanfaatkan pada masa kini dengan tidak mempengaruhi secara signifikan manfaat di masa mendatang. Artinya bahwa pemanfaatan tersebut harus mampu memberikan manfaat secara terus menerus. Masyarakat juga mengharapkan bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir Lampung dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini juga sangat sesuai dengan kriteria atau indikator pembangunan berkelanjutan, yaitu bahwa suatu kegiatan atau pemanfaatan dapat dikatakan berkelanjutan ketika kegiatan tersebut mampu bertahan dan berkelanjutan secara ekonomi, ekologi dan sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan dalam hal ini dijadikan sebagai salah satu kata kunci penting dalam membangun visi Gerbang Pelana.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tatanan masyarakat yang dapat hidup secara layak di wilayah pesisir Lampung. Kelayakan hidup yang dimaksud diantaranya bahwa masyarakat dapat hidup dengan pendapatan yang optimal sehingga tingkat pengeluarannya juga optimal, masyarakat dapat hidup dan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan beragama, masyarakat dapat memperoleh jaminan keamanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat seoptimal mungkin harus menjadi tujuan utama (*objective goal*) pengelolaan, sehingga dalam hal ini kesejahteraan masyarakat dalam hal ini dijadikan sebagai salah satu kata kunci penting dalam membangun visi Gerbang Pelana.

Berdasarkan tujuh kata kunci sesuai dengan harapan masyarakat dan hasil analisis seperti diuraikan di atas, maka Visi Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna (Gerbang Pelana) adalah :

**”PESISIR LAMPUNG TERBANGUN OPTIMAL, TERPADU DAN
BERKELANJUTAN BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

Upaya untuk mewujudkan Visi Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna (Gerbang Pelana) tersebut selanjutnya dapat dicapai melalui misi Gerbang Pelana. Melalui misi ini diharapkan dapat diwujudkan implementasi Gerbang

Pelana secara terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Misi Gerbang Pelana adalah:

- (1) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat.
- (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam pengelolaan pesisir Lampung.
- (3) Memelihara, memperbaiki dan meningkatkan daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir Lampung.
- (4) Mendorong akses infrastruktur pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Mengingat visi merupakan ungkapan keinginan atau harapan atau pandangan masa depan yang ingin dicapai semua pihak yang terkait (*stakeholders*) dari pengelolaan pesisir Lampung yang dinyatakan dalam kalimat yang singkat, maka harapan tersebut perlu dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan pengelolaan pesisir Lampung secara umum terangkum dalam empat kategori tujuan, yaitu (i) tujuan kelembagaan, (ii) tujuan sosial budaya (iii) tujuan ekologi, (iv) tujuan ekonomi.

3.1.2.1 Tujuan Kelembagaan

Tujuan kelembagaan dalam pengelolaan pesisir Lampung adalah *terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat*. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

- (1) Tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat;
- (2) Berkurangnya konflik diantara pemilik, pengguna dan pengelola sumberdaya pesisir;
- (3) Tersedianya data dan informasi yang relevan untuk kepentingan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu;
- (4) Tersedianya hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pesisir secara terpadu.

3.1.2.2 Tujuan Sosial Budaya

Tujuan sosial budaya dalam pengelolaan pesisir Lampung adalah *meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dalam pengelolaan pesisir Lampung*. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

- (1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam pengelolaan pesisir Lampung;
- (2) Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir;
- (3) Terbukanya kesadaran setiap *stakeholder* bahwa sumberdaya alam pesisir dan lingkungannya mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi.

3.1.2.3 Tujuan Ekologi

Tujuan ekologi dalam pengelolaan pesisir Lampung adalah *memelihara, memperbaiki dan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir Lampung*. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

- (1) Terjaganya kualitas lingkungan pesisir Lampung;
- (2) Terwujudnya konservasi terhadap keanekaragaman hayati (jenis, habitat dan ekosistem) yang terintegrasi dan berkesinambungan antara lahan (*up land*) atas daerah bawah (*low land*);
- (3) Tumbuhnya kesadaran setiap *stakeholder* untuk memelihara dan merehabilitasi lingkungan pesisir.

3.1.2.4 Tujuan Ekonomi

Tujuan ekonomi dalam pengelolaan pesisir Lampung adalah *mendorong akses infrastruktur pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kawasan pesisir Lampung sebagai kawasan ekonomi kelautan yang terpadu guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat*. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- (1) Berkembangnya industri pariwisata yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan sosial dan budaya setempat;

- (2) Berkembangnya kegiatan perikanan dengan tetap mempertahankan keberlanjutannya;
- (3) Berkembangnya berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu;
- (4) Meningkatnya motivasi, kesadaran dan keinginan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan untuk kegiatan pariwisata terpadu;
- (5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan yang didukung kemudahan/akses infrastruktur.
- (6) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dasar.

3.2 Peta Jalan Strategi Pencapaian Tujuan

Strategi pencapaian tujuan pengelolaan pesisir disusun untuk menjalankan visi dan misi yang diharapkan dapat diwujudkan berdasarkan tujuan pengelolaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Masing-masing tujuan diharapkan dapat dicapai melalui rumusan strategi yang dibangun. Tujuan Gerbang Pelana mengandung empat tujuan utama, yaitu (i) tujuan kelembagaan, (ii) tujuan sosial budaya, (iii) tujuan ekologi, dan (iv) tujuan ekonomi. Oleh karena itu, rumusan strategi pada masing-masing tujuan tersebut seoptimal mungkin dibangun untuk mewujudkan tujuan utama pengelolaan pesisir Lampung melalui implementasi Gerbang Pelana ini. **Tabel 7** berikut ini menyajikan rumusan strategi dan program berdasarkan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan VISI dan MISI GERBANG PELANA dalam bentuk matriks hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan program implementasi Gerakan Pembangunan Pesisir Lampung Berdaya Guna.

Tabel 7. Rumusan strategi dan program berdasarkan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan VISI dan MISI GERBANG PELANA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
TUJUAN KELEMBAGAAN				
Terwujudnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat.	1. Tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat	1.1. Menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir Lampung secara terpadu dan berbasis masyarakat	1.1.1. Penyusunan dan pemantapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis masyarakat dan disepakati dan dipatuhi segenap stakeholder pesisir.	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kanwil BPN Prov. Lampung
			Perumusan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengintegrasikan Rencana Zonasi WP3K dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kanwil BPN Prov. Lampung
			Pembuatan Rencana Zonasi Kawasan yang disesuaikan dengan peruntukan dan mengakomodir berbagai kegiatan pembangunan serta kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kanwil BPN Prov. Lampung
			Penyusunan rencana tata ruang secara lebih rinci (<i>site plan</i>) untuk berbagai kegiatan pembangunan yang potensial untuk dikembangkan	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kanwil BPN Prov. Lampung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
	2. Berkurangnya konflik diantara pemilik, pengguna dan pengelola sumberdaya pesisir;	2.1. Melibatkan semua stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya pesisir	2.1.1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam perencanaan, implementasi dan pemantauan sumberdaya pesisir	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Swasta dan Masyarakat
	3. Tersedianya data dan informasi yang relevan untuk kepentingan pengelolaan pesisir secara terpadu;	3.1. Menyusun data dan informasi yang relevan untuk kepentingan pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu	3.1.1. Penyusunan berbagai kajian dan penelitian untuk mendukung implementasi pengelolaan pesisir secara terpadu	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Balitbangda, dan Perguruan Tinggi
	4. Tersedianya hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pesisir secara terpadu	4.1. Mengembangkan hukum dan kelembagaan secara terpadu	4.1.1. Pengembangan kelembagaan yang menunjang berbagai kegiatan ekonomi di wilayah pesisir	Bappeda, Balitbangda, Biro Hukum, Perguruan Tinggi
			4.1.2. Penyiapan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan kawasan pesisir di Lampung	Bappeda, Balitbangda, Biro Hukum, Perguruan Tinggi
			4.1.2. Pengembangan sistem dan mekanisme yang kondusif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan "win-win solution"	Bappeda, Swasta, Masyarakat, Balitbangda, dan Perguruan Tinggi
			4.1.3. Pembangunan sistem dan mekanisme yang mendukung penegakan hukum secara adil dan tidak memihak	Bappeda dan Balitbangda, Perguruan Tinggi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
TUJUAN SOSIAL BUDAYA				
Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya dalam pengelolaan pesisir Lampung	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) <i>lainnya</i> dalam pengelolaan pesisir Lampung;	1.1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) <i>lainnya</i> dalam pengelolaan pesisir Lampung;	1.1.1. Pembangunan sistem dan mekanisme pelibatan stakeholder dari proses perencanaan sampai proses implementasi pengelolaan sumberdaya pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			1.1.2. Peningkatan peran serta stakeholder dalam pengawasan langsung pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
	2. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir;	2.1. Mengembangkan sumberdaya manusia	2.1.1. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terkait dengan pengembangan kawasan pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			2.1.2. Pengembangan muatan lokal yang terkait dengan pengembangan kawasan pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			Pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan kawasan pesisir	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
	3. Terbukanya kesadaran setiap <i>stakeholder</i> bahwa sumberdaya alam pesisir dan lingkungannya mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi;	3.1. Meningkatkan kesadaran stakeholder bahwa sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir memiliki nilai jual yang meningkatkan kesejahteraannya	3.1.1. Penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh stakeholder pesisir tentang tingginya nilai jual sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir mereka dan dapat meningkatkan kesejahteraannya	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Balitbangda, dan Perguruan Tinggi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
TUJUAN EKOLOGI				
Memelihara, memperbaiki dan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir Lampung	1. Terjaganya kualitas lingkungan pesisir Lampung;	1.1. Memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir Lampung;	1.1.1. Identifikasi dan inventarisasi kondisi sumberdaya alam dan kualitas lingkungan pesisir Lampung untuk menentukan status perlakuan yang perlu diberikan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir tersebut	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata
			1.1.2. Rehabilitasi kawasan konservasi, pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			1.1.3. Rehabilitasi dan penanggulangan degradasi lingkungan pesisir Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			1.1.4. Rehabilitasi dan penanggulangan abrasi, sedimentasi dan pencemaran lingkungan pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			1.1.5. Penetapan hukum dan aturan yang jelas dan tegas bagi perlindungan sumberdaya alam pesisir Teluk Lampung	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Hukum, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
	2. Terwujudnya konservasi terhadap keanekaragaman hayati (jenis, habitat dan ekosistem) yang terintegrasi dan berkesinambungan antara lahan (<i>up land</i>) atas daerah bawah (<i>low land</i>);	2.1. Mewujudkan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati (jenis, habitat dan ekosistem) yang terintegrasi dan berkesinambungan antara lahan atas (<i>up land</i>) atas daerah bawah (<i>low land</i>);	2.1.1. Identifikasi, inventarisasi dan pengkajian kawasan hulu yang mempunyai keanekaragaman hayati (jenis, habitat dan ekosistem) tinggi yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kegiatan pembangunan wilayah pesisir untuk direkomendasikan sebagai kawasan konservasi	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
	3. Tumbuhnya kesadaran setiap <i>stakeholder</i> untuk memelihara dan merehabilitasi lingkungan pesisir;	3.1. Menumbuhkan kesadaran setiap <i>stakeholder</i> untuk memelihara dan merehabilitasi lingkungan pesisir;	3.1.1. Penyuluhan dan pelatihan terhadap semua stakeholder mengenai pentingnya memelihara dan merabilitasi lingkungan pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, BKSDA dan Balitbangda, Perguruan Tinggi
			3.1.2. Pemberian <i>reward</i> /penghargaan terhadap setiap individu atau kelompok yang telah berjasa dalam melestarikan dan merehabilitasi lingkungan pesisir	Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup
			3.1.3. Penumbuhan kesadaran sejak usia dini untuk memelihara dan merehabilitasi lingkungan pesisir;	Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
TUJUAN EKONOMI				
Mendorong akses infrastruktur pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kawasan Teluk Lampung sebagai kawasan wisata terpadu guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.	1. Berkembangnya industri pariwisata yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan sosial dan budaya setempat;	1.1. Mengembangkan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan sosial dan budaya setempat;	1.1.1. Penyusunan berbagai kajian dan penelitian untuk mendukung implementasi kawasan Lampung sebagai kawasan wisata terpadu [kajian daya dukung, daya tampung dan kesesuaian]	Bappeda, Balitbangda dan Dinas Pariwisata
			1.1.2. Inventarisasi berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat dikembangkan secara terpadu	Bappeda dan Dinas Pariwisata
			1.1.3. Pembuatan <i>master plan</i> untuk pengembangan kawasan Lampung sebagai kawasan wisata terpadu	Bappeda, Dinas PU dan Penataan Ruang dan Dinas Pariwisata
			1.1.4. Pembangunan berbagai prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kawasan wisata terpadu	Bappeda Dinas PU dan Penataan Ruang dan Dinas Pariwisata
			1.1.5. Program studi banding ke beberapa lokasi pengembangan wisata terpadu, baik dalam maupun luar negeri	Bappeda dan Dinas Pariwisata
			1.1.6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengembangan kawasan Lampung sebagai kawasan wisata terpadu	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PMD dan Dinas Lingkungan Hidup
			1.1.7. Pengembangan paket-paket wisata terpadu	Dinas Pariwisata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
			1.1.8 Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada nelayan untuk menjadi <i>tour gate</i> yang baik	Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan
			1.1.9. Sosialisasi kepada pelaku usaha wisata bagaimana menjalankan wisata yang ramah lingkungan. [misal; menjaga kebersihan, tidak menginjak terumbu karang, dll	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup
	2. Berkembangnya kegiatan perikanan dengan tetap mempertahankannya keberlanjutannya;	2.1. Mengembangkan kegiatan perikanan dengan tetap mempertahankannya keberlanjutannya;	2.1.1. Penyusunan berbagai kajian dan penelitian dalam mengembangkan kegiatan perikanan untuk mendukung implementasi kawasan Lampung sebagai kawasan wisata terpadu	Bappeda, Balitbangda dan Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.1.2. Inventarisasi berbagai potensi perikanan yang dapat dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan	Bappeda, Balitbangda dan Dinas Kelautan dan Perikanan
			2.1.3. Pembuatan <i>master plan</i> pengembangan perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Lampung sebagai kawasan wisata terpadu	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas PU dan Penataan Ruang
			2.1.4. Pembangunan berbagai prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kegiatan perikanan	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas PU dan Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
			2.1.5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengembangan kegiatan perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Masyarakat
			2.1.6. Pengembangan budidaya perikanan berbasis pendekatan “sea farming”	Bappeda, Balitbangda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Masyarakat
		2.2. Mengembangkan produk bernilai tambah (<i>added value</i>) untuk hasil perairan	2.2.1 Memberi pelatihan terkait pengolahan rumput laut menjadi semi karagenen (<i>Chip</i>)	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, dan Balitbangda
			2.2.2 Memberikan pelatihan pengolahan surimi daging ikan untuk bahan setengah jadi sebagai bahan baku ekspor	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.2.3 Memberikan pelatihan terkait pengemasan produk hasil perikanan dan peningkatan kualitas sanitasi dan heygin untuk pengolahan hasil perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas PMD, Bappeda, dan Balitbangda
			2.2.4 Mengembangkan BUMDes Pesisir	Dinas PMD, Dinas Koperasi UKM, Biro Perekonomian, Balitbangda, Bappeda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
		2.3. Ekstensifikasi budidaya	2.3.1 Kajian potensi detail budidaya perikanan di Teluk Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.3.2 Penataan detail budidaya perikanan di Teluk Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.3.3 Revitalisasi budidaya perikanan di Teluk Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.4 Intensifikasi budidaya	2.3.1 Perbaikan tambak, saluran dan areal budidaya perikanan di Teluk Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.3.2 Kaji tindak perbaikan sistem perbenihan udang dan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.3.3 Kaji tindak pengembangan teknologi budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.3.4 Pengembangan kemampuan SDM	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.5 Diversifikasi sistem produksi	2.5.1 Pengembangan sistem akuakultur	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.5.2 Pengembangan komoditas	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
			2.5.3 Pengembangan pembenihan ikan onshore dan offshore	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.5.4 Pengembangan pendederan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.6 Mengatur kegiatan penangkapan ikan	2.6.1 Pengaturan penggunaan alat tangkap : (i) Pembatasan alat tangkap udang, (ii) Pengalihan, (iii) Waktu penangkapan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.7 Mengintegrasikan kegiatan budidaya dan penangkapan ikan : pengembangan sea farming	2.7.1 Penyiapan masyarakat	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.7.2 Penyiapan ekosistem	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.7.3 Penyiapan stok benih	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.8 Mengkonservasi dan merehabilitasi habitat SDI	2.8.1 Pengawasan kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.9 Memperkaya stok SDI	2.9.1 Penambahan stok SDI kembali (<i>Restocking</i>)	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.9.2 Pengkayaan Stok SDI (<i>Stock enhancement</i>)	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.9.3 Pelembagaan kelompok nelayan dalam rangka memperkaya stok SDI	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
		2.10 Meningkatkan kualitas produksi perikanan tangkap	2.10.1 Peningkatan fasilitas penanganan pasca panen ikan/udang	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
		2.11 Mendorong percepatan pendapatan nelayan	2.11.1 Pengembangan mata pencaharian alternatif	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
			2.11.2 Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD, Bappeda dan Balitbangda
	3. Berkembangnya berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu;	3.1. Mengembangkan berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu;	3.1.1. Penyusunan berbagai kajian dan penelitian dalam mengembangkan berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu;	Bappeda dan Balitbangda
			3.1.2. Inventarisasi berbagai kawasan yang mempunyai potensi berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu	Bappeda dan Balitbangda
			3.1.3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pengembangan berbagai kegiatan lainnya seperti pertanian, industri, perhubungan dan perdagangan untuk menunjang dan mewujudkan pengembangan pariwisata terpadu;	Bappeda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
	4. Meningkatnya motivasi, kesadaran dan keinginan Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan untuk kegiatan pariwisata terpadu;	4.1. Meningkatkan motivasi, kesadaran dan keinginan Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan untuk kegiatan pariwisata terpadu;	4.1.1. Inventarisasi berbagai potensi investor yang berminat melakukan penanaman modal dalam pengembangan wisata	Bappeda dan Dinas Pariwisata
			4.1.2. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan adanya jaminan keamanan dari pemerintah dan masyarakat	Dinas Pariwisata, TNI dan POLRI
			4.1.3. Pengembangan sistem kemitraan antara investor dengan masyarakat setempat	Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas PMD
			4.1.4. Penyediaan pusat informasi dan pemasaran wisata	Bappeda dan Dinas Pariwisata
			4.1.5. Pengembangan sistem intensif dan disintensif untuk menarik minat para investor dalam menanamkan modalnya	Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas PMD
			4.1.6. Penggalan berbagai sumber pendanaan lainnya untuk menunjang pelaksanaan berbagai program pengembangan kawasan pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas PMD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	LEMBAGA
	5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan yang didukung kemudahan/akses infrastruktur.	5.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir Lampung	5.1.1. Pengembangan ekonomi kawasan berbasis sumberdaya lokal	Bappeda
			5.1.2. Peningkatan produktivitas pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas TPH, Dishub, dan Dinas Perindustrian
			5.1.3. Peningkatan promosi investasi kawasan pesisir Lampung	Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			5.1.4. Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas melalui jalur laut atau sungai	Dinas Perhubungan dan Dinas PU dan Penataan Ruang
			5.1.5. Melakukan kajian kelayakan water front city di Teluk Lampung	Balitbangda dan Bappeda
	6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dasar.	6.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Lampung.	6.1.1. Pengembangan <i>alternative income</i> disesuaikan dengan karakteristik SDM Teluk Lampung	Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan
			6.1.2. Pengembangan sistem pemasaran produk yang dihasilkan oleh masyarakat secara terintegrasi	Bappeda, Dinas Perdagangan, Biro Perekonomian
			6.1.3. Pengembangan lapangan pekerjaan yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal	Bappeda, Dinas Naker dan Trans
			6.1.4. Penyediaan/pengembangan infrastruktur dasar	Dinas PU dan Penataan Ruang, Bappeda

IV INOVASI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM GERBANG PELANA

4.1 Inovasi Program Gerbang Pelana

Secara global, Indonesia dan bahkan dunia mengenal program pembangunan yang disebut dengan ICM (*integrated coastal management*) sebagai sebuah pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan secara terpadu. Keterpaduan yang dianut adalah (i) keterpaduan wilayah/ekologis, (ii) keterpaduan sektor, (iii) keterpaduan disiplin ilmu, dan (iv) keterpaduan *stakeholders*. Penyusunan program serupa juga pernah dilakukan di Tangerang melalui Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai), demikian pula beberapa daerah lain yang telah melakukan upaya perencanaan strategis dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RS-WP3K).

Perbedaan mendasar program Gerbang Pelana dan program pembangunan pesisir dan laut lainnya adalah adanya inovasi introduksi dan internalisasi pendekatan sistem sosial ekologi (*social-ecological system, SES*) ke dalam pendekatan ICM. Artinya bahwa empat keterpaduan yang telah disebutkan didesain berdasarkan pendekatan SES, dimana segenap upaya yang dilakukan untuk mencapai prinsip keberlanjutan dalam pembangunan berkelanjutan (keberlanjutan ekologi, sosial dan ekonomi) adalah semata-mata berdasarkan pola interaksi dan hubungan timbal balik dari kondisi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sistem sosial- ekonomi masyarakat yang saling mempunyai ketergantungan satu-sama lainnya pada masa lalu, saat ini dan akan datang.

Desain dan indikasi program dalam GERBANG PELANA diarahkan untuk memberikan penguatan upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem pada satu sisi dan di sisi lain meningkatkan performa dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ketergantungan masyarakat pesisir akan sumberdaya wilayah pesisir dan laut menjadi salah satu fokus pemberdayaan masyarakat yang dibangun. Selain itu, program GERBANG PELANA ini didesain agar dapat bersinergi dan saling berkomplemen dengan program unggulan Gubernur yang telah digulirkan sebelumnya, yaitu GERBANG DESA SABURAI.

Pendekatan pembangunan ekonomi pada GERBANG PELANA ini juga didesain berbasis pada keberadaan sumberdaya pesisir dan laut. Terdapat tujuh spektrum ekonomi kelautan yang menjadi pilar dan motor penggerak ekonomi wilayah pesisir, yaitu (i) perikanan, (ii) pariwisata bahari, (iii) transportasi laut, (iv) industri kelautan, (v) energi kelautan, (vi) bangunan kelautan, dan (vii) jasa kelautan. Ketujuh spektrum ekonomi kelautan ini didesain dengan model dan pendekatan pembangunan yang HITS - holistik, integratif, tematik dan spasial (ATR, 2016) melalui pola kemitraan publik (pemerintah), swasta (investor) dan rakyat (masyarakat) atau dikenal sebagai P4 (*public, private, people partnership*). Oleh karena itu, sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, maka diharapkan bahwa pada akhir program Gerbang Pelana, akan banyak muncul secara mandiri dan berkelanjutan BUMDes di wilayah pesisir yang berbasis pada tujuh spektrum ekonomi tersebut, sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari keberadaan sumberdaya pesisir dan laut di sekitarnya secara berkelanjutan.

4.2 Indikator Keberhasilan Gerbang Pelana

Tujuan program Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna adalah untuk mengakselerasi program pembangunan pesisir yang selama ini telah dan sedang dilakukan. Program ini memang didesain untuk melakukan upaya pembangunan yang terintegrasi sesuai dengan pendekatan pengelolaan pesisir terpadu (*integrated coastal management, ICM*). Pendekatan ICM mengedepankan keseimbangan dan keberlanjutan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsip (i) keberlanjutan ekologi, (ii) keberlanjutan sosial, dan (iii) keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, maka indikator keberhasilan pembangunan seyogianya didesain berdasarkan ketiga prinsip keberlanjutan tersebut.

Sesuai dengan visi dan misi yang kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, maka indikator keberhasilan Gerbang Pelana didesain juga berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun dalam dokumen ini, yaitu (i) tujuan kelembagaan, (ii) tujuan ekologi, (ii) tujuan sosial, dan (iv) tujuan ekonomi. Indikator keberhasilan program Gerbang Pelana selengkapnyapun dapat ditentukan dengan melihat indeks pembangunan pesisir (*coastal development index, CDI*). CDI atau Indeks Pembangunan Pesisir (IPP) merupakan sebuah indeks yang didesain sebagai alat ukur

keberhasilan pembangunan pesisir Lampung. CDI dapat menentukan status terkini dari kinerja pembangunan pesisir yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Secara metodologi, CDI ini dikembangkan berdasarkan metodologi Sustainable Development Index (SDI) yang didesain untuk mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Algoritma CDI tersusun atas empat indikator inti, yaitu (i) *land use index*, LUI, (ii) *ecological index*, EI, (iii) *socio-economic index*, SEI, dan (iv) *governance index*. Formula CDI dapat dituliskan sebagai berikut:

$$CDI = LUI \times EI \times SEI \times GI$$

Besaran nilai CDI berkisar diantara 0 - 1, dengan status pembangunan pesisir dibagi menjadi 5 tingkat kinerja. Kriteria keberhasilan selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 8** berikut:

Tabel 8. Indeks kinerja pembangunan pesisir Lampung

No	Nilai Indeks	Tingkat Kinerja Pembangunan
1	0.81 - 1.00	Sangat Baik (<i>very good</i>)
2	0.61 - 0.80	Baik (<i>good</i>)
3	0.41 - 0.60	Cukup (<i>moderate</i>)
4	0.21 - 0.40	Kurang (<i>poor</i>)
5	0.01 - 0.20	Sangat Kurang (<i>very poor</i>)

Komponen indeks LUI dapat ditentukan dengan menganalisa beberapa indikator berikut:

- a. Rasio luas ekosistem mangrove dengan total luas wilayah desa pesisir (30% sebagai reference point maksimal)
- b. Rasio jumlah penduduk dengan luas wilayah kecamatan pesisir (1000 jiwa/km² sebagai reference point rata-rata)
- c. Rasio aksesibilitas publik terhadap panjang pantai (100% akses sebagai reference point rata-rata)
- d. Panjang garis pantai (190 km sebagai reference point rata-rata)
- e. Rasio luas wilayah laut terhadap total luas wilayah (70% sebagai reference point maksimal)

Komponen indeks EI dapat ditentukan dengan menganalisa beberapa indikator berikut:

- a. Kualitas ekosistem mangrove (INP=3 sebagai reference point rata-rata)
- b. Kualitas tutupan lamun (100% penutupan sebagai reference point maksimal)
- c. Kualitas tutupan karang (100% penutupan reference point maksimal)
- d. Keberadaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan (2% sebagai reference point rata-rata)
- e. Rasio perkembangan penggunaan energi berbasis fosil (2% sebagai reference point rata-rata)

Komponen indeks SEI dapat ditentukan dengan menganalisa beberapa indikator berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM 100 sebagai reference point maksimal)
- b. Konsumsi ikan per kapita per tahun (42 kg/kapita/tahun sebagai reference point rata-rata)
- c. Kontribusi sektor kelautan terhadap PDRB (20% sebagai reference point rata-rata)
- d. PDRB perikanan per kapita nelayan (Rp. 50.000/kapita/hari sebagai reference point rata-rata)
- e. Rasio jumlah penduduk kecamatan pesisir terhadap total populasi kabupaten/kota (60% sebagai reference point maksimal)

Komponen indeks GI dapat ditentukan dengan menganalisa beberapa indikator berikut:

- a. Kelengkapan dokumen hirarki pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RS-WP3K, RZ-WP3K, RP-WP3K, RA-WP3K)
- b. Keberadaan SKPD khusus yang mengurus wilayah pesisir (ada berdiri sendiri, ada bersatu dengan SKPD lain, tidak ada)
- c. Rasio alokasi anggaran pembangunan WP3K terhadap jumlah penduduk kecamatan pesisir (Rp.200.000,- sebagai reference point rata-rata)
- d. Keberadaan peraturan daerah mengenai pengelolaan terpadu WP3K (ada sudah diperdakan, dalam proses, belum ada)

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Semangat penyusunan kajian GERBANG PELANA ini didasarkan atas pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (ICM) yang berbasis masyarakat. Melalui dokumen peta jalan Gerakan Membangun Pesisir Lampung Berdaya Guna (GERBANG PELANA) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam implemmentasi kegiatan GERBANG PELANA. Program ini seyogyanya harus dikerjasamakan dengan berbagai pihak termasuk dari pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan desa pesisir. Program ini harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan serta memerlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, sebab pelaku dan sasaran program ini adalah kecamatan dan desa pesisir itu sendiri. Semoga GERBANG PELANA dapat diimplementasikan dengan baik dan mendapat dukungan semua pihak.

5.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk melanjutkan roadmap Gerbang Pelana yang sudah diiniasi ini, maka diperlukan langkah lanjutan yang harus dilakukan secara berurutan, agar program yang disusun dapat berjalan efektif dan efisien. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan ini perlu diawali dengan penyamaan persepsi para pihak tentang hakikat dan ruh Gerbang Pelana, karena jika pemahamannya berbeda antar para pihak, maka program ini akan menghadapi kendala dalam implementasinya
2. Kegiatan pada tahap awal yang dilaksanakan seyogyanya berupa kegiatan peningkatan kapasitas, terutama yang bersifat fundamental, seperti pemahaman tentang pengelolaan pesisir terpadu, disamping program-program riil yang sifatnya mendesak karena faktor kebutuhan dasar masyarakat saat ini seperti perbaikan infrastruktur dasar, penyediaan kebutuhan penunjang hidup. Hal ini penting agar masyarakat tidak terganggu dengan rusak/hilangnya fungsi fasilitas tersebut.

3. Program berikutnya yang diupayakan dilaksanakan pada tahap awal sambil berjalannya dua rekomendasi awal, adalah penyiapan kapasitas desa pesisir. Hal ini didasari bahwa setelah keluarnya Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi sangat strategis dan penting.
4. Agar program GERBANG PELANA, maka dapat dilaksanakan dampingan dan dukungan bagi kecamatan dan desa pesisir yang menjadi prioritas daerah. Untuk itu, agar implementasi program dapat diwujudkan cepat, maka syarat utamanya adalah kapasitas aparat dan kelembagaan kecamatan/desa juga harus siap memfasilitasi implementasi program ini.
5. Perlu sinkronisasi usulan indikasi program dengan nomenklatur Program/Kegiatan yang baku, demikian pula padu serasi dengan dokumen perencanaan yang ada seperti RPJM, SDG's, dan spasial/tata ruang.